

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BP3TKI BANDUNG TAHUN 2019



**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BANDUNG**

Jalan Soekarno – Hatta No. 587 Telp. 022-7333212/Fax. 022-7336965 Bandung 40287
e-mail : bp3tkibandung@bnp2tki.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan menggunakan pedoman penyusunan LAKIP yang baru berdasarkan Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP ini dibuat guna memenuhi kewajiban setiap unit satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran kepada atasan.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode LAKIP yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung tahun 2019 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 20 Januari 2020
Plt. Kepala,

Ttd.

Tugiyarto, S.Sos.
NIP. 19671209 198602 1 001

**DAFTAR ISI**

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan (<i>Issue Strategis</i>)	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Struktur Organisasi dan Pegawai	4
H. Dasar Pelaksanaan	6
I. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis BP3TKI Bandung 2015-2019	10
B. Program dan Kegiatan	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengelolaan Kinerja	26
B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019	31
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019	33
D. Akuntabilitas Keuangan	44
E. Kendala	47
F. Tindak Lanjut	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1. Jumlah Pegawai BP3TKI Bandung Tahun 2019	6
Tabel 2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BP3TKI Bandung	11
Tabel 3. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja BP3TKI Bandung	12
Tabel 4. Target Kinerja BP3TKI Bandung	13
Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi BP3TKI Bandung Tahun 2015 - 2019	15
Tabel 6. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Kelembagaan	17
Tabel 7. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Penyiapan	18
Tabel 8. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Perlindungan	18
Tabel 9. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Bagian Tata Usaha	19
Tabel 10. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
Tabel 11. Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019	22
Tabel 12. Reviu Target Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019	24
Tabel 13. Kategori Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019	26
Tabel 14. Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019 (Per Triwulan)	27
Tabel 15. Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019	29
Tabel 16. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019	31
Tabel 17. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu	33
Tabel 18. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua	34
Tabel 19. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga	35
Tabel 20. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat	35
Tabel 21. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima	36
Tabel 22. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam	37
Tabel 23. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh	38
Tabel 24. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan	38
Tabel 25. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan	39
Tabel 26. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh	41
Tabel 27. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas	42
Tabel 28. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas	42
Tabel 29. Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Tahun 2019	45
Tabel 30. Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2019	46
Tabel 31. Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2019	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP3TKI Bandung serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan Instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai eselon II ke atas secara berjenjang, maka disusunlah LAKIP BP3TKI Bandung Tahun 2019.

Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, BP3TKI Bandung ke depan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan harus semakin cermat dalam menyusun perencanaan agar lebih fokus, dan dapat menjawab berbagai persoalan.

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan BP3TKI Bandung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi BP3TKI Bandung 2015–2019, terdapat 12 sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) Tersedianya Peta Potensi CTKI;
- 2) Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;
- 3) Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural;
- 5) Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan;
- 7) Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna;
- 8) Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan;
- 9) Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro;
- 10) Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah;

- 11) Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan;
- 12) Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan penempatan TKI, dinilai dari Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2019, yaitu:

- 1) Jumlah Potensi CTKI;
- 2) Persentase CTKI mendaftar pada Job info;
- 3) Persentase TKI yang ditempatkan memenuhi standar yang ditetapkan;
- 4) Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem;
- 5) Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 6) Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN;
- 7) Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan;
- 8) Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI;
- 9) Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI;
- 10) Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum;
- 11) Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen;
- 12) Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural;
- 13) Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha;
- 14) Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan;
- 15) Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha;
- 16) Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI;
- 17) Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya;
- 18) Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal;

- 19) Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP;
- 20) Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat;
- 21) Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM);
- 22) Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI.

Adapun ringkasan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel
Ringkasan Capaian Kinerja Triwulan III
Tahun 2019

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	8.000	6.151	76,89
		Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	30%	10%	33,33
2.	Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	133,46%	133,46
		Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem	100%	34,77%	34,77
3.	Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	48,54%	48,54
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/ Kota	9 Kab/Kota	100
5.	Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%	90,18%	90,18
6.	Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	173,75%	173,75

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
7.	Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%	11,31%	113,1
		Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	5,32%	5,32
8.	Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	0%	0
		Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100%	133,46%	133,46
9.	Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	0	0
		Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	0
		Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	0%	0
		Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200	0	0
		Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	0	0
10.	Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	48	96
11.	Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	12 bulan	100
		Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	80
12.	Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	100%	100
		Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi	4 Lokasi	100
		Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100

KENDALA

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak TKI/CTKI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat TKI / memberikan info ke Keluarga TKI tentang permasalahan TKI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan PPTKIS untuk mediasi sangat sulit dikarenakan PPTKIS apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak PPTKIS yang tutup.
- 3) Counter Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan TKI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan TKI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor formal untuk tujuan Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya untuk diinformasikan kepada pencari kerja.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website *jobsinfo* (*jobsinfo.bnp2tki.go.id*) dan cara menggunakannya.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum terdapat mesin Finger Print untuk Petugas Honorer sehingga absensi masih secara manual.

- 2) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

TINDAK LANJUT

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan TKI Korea untuk mendapatkan data TKI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan BNP2TKI (Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Promosi) mengenai lowongan kerja yang tersedia di wilayah Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya;
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website jobsinfo.bnp2tki.go.id kepada pencari kerja.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Konsultasi dan koordinasi dengan BNP2TKI untuk mengatasi permasalahan absensi untuk Petugas Honorer.
- 2) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja BP3TKI Bandung pada tahun 2018. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan BP3TKI Bandung dan seluruh jajaran BNP2TKI dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3TKI Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung diberikan tugas pokok yaitu "*Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah*

Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di wilayah Propinsi Jawa Barat”.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, Pengembangan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pemasarakatan Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
5. Pengumpulan data, Pembinaan Layanan Informasi serta Pembinaan Sistem dan Jaringan Informasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Pelaksanaan Pemantauan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Negara Penempatan;
8. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia Penempatan oleh Pemerintah;
9. Monitoring Penyediaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
10. Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
11. Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia;
12. Fasilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Penyusunan kelompok jabatan pengantar kerja;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

C. ASPEK STRATEGIS

Berkaitan dengan pencapaian target RPJM Tahun 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok **strategi BP3TKI Bandung** yang difokuskan pada :

1. Unit Pelayanan Publik yang sudah memenuhi standar pelayanan;
2. Pemanfaatan jobs info BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI;
3. Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;
4. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan melalui Crisis Center;
5. Fasilitasi Pelayanan Perlindungan TKI melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarganya.

D. PERMASALAHAN UTAMA (*ISSUE STRATEGIS*)

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia antara lain:

1. Hasil Pemetaan Potensi CTKI yang dilakukan oleh BP3TKI Bandung masih merupakan data mentah dan belum spesifik mengarah pada Peta CTKI.
2. Belum adanya potret daerah yang dapat digunakan dalam pembuatan model penyuluhan/sosialisasi.
3. Perlunya Bimbingan Teknis Petugas Penyuluh dalam rangka Peningkatan SDM.
4. Pemanfaatan Jobs Info masih belum sempurna, karena Petugas Jobs Info tidak dapat mengetahui berapa orang Jawa Barat yang telah mengakses ke Jobs Info.
5. Koneksi Jaringan (internet) yang tidak stabil mempengaruhi akses ke SISKOTKLN.
6. Realisasi Penempatan berbeda dengan realisasi PAP, karena TKI Cuti dan Re-Entry tidak mengikuti PAP sedangkan itu menjadi angka realisasi penempatan.
7. Permasalahan kasus terhadap TKI yang habis kontrak namun masih dipertahankan oleh majikan sedangkan keluarga dan TKI tersebut ingin pulang. BP3TKI Bandung sudah berkirin surat ke Kementerian Luar Negeri namun surat tersebut tidak ditanggapi.
8. Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan tidak ada anggaran monitoring walaupun lewat telepon tetapi tidak maksimal.
9. Tidak adanya anggaran untuk Identifikasi peserta Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan sehingga peserta yang diinginkan sesuai PERKA Badan tidak bisa dipenuhi.
10. Perlunya Bimbingan Teknis Evaluator Akuntabilitas Kinerja.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut LAKIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun agar diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan hasil-hasilnya dari pelaksanaan program dan kegiatan BP3TKI Bandung yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

F. RUANG LINGKUP

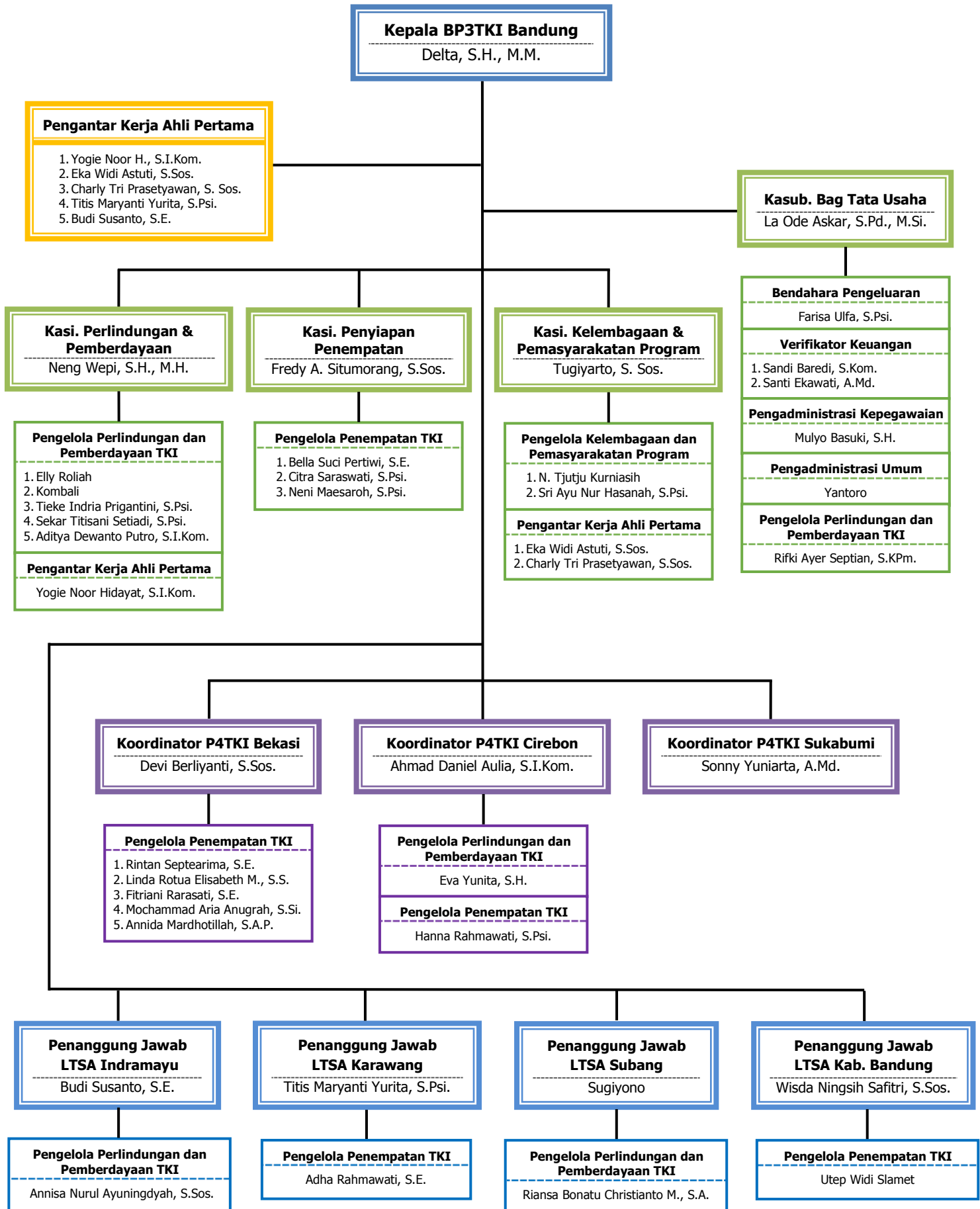
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh BP3TKI Bandung mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan khususnya tugas dan fungsi dalam lingkup pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat.

G. PERSONALIA DAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BP3TKI Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI BANDUNG



2. Jumlah Pegawai

BP3TKI Bandung pada tahun 2019 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti pada tabel tersebut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai BP3TKI Bandung Tahun 2019

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin			Pangkat/ Gol				Jab		Struktural		Status Kepegawaian	
		L	P	JML	I	II	III	IV	S	NS	ES.III	ES.IV	PNS	CPNS
1	Kepala BP3TKI	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
2	Sub. Bagian Tata Usaha	5	2	7	2	-	5	-	1	6	-	1	7	-
3	Seksi Penyiapan Penempatan	2	4	6	-	-	6	-	1	5	-	1	5	1
4	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	4	4	8	-	-	8	-	1	7	-	1	8	-
5	Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Prog.	2	3	5	-	-	5	-	1	4	-	1	5	-
6	P4TKI Bekasi	1	5	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-
7	P4TKI Cirebon	1	1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
8	LTSA Cirebon	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
9	P4TKI Sukabumi	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
10	LTSP Indramayu	1	1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
11	PTSP Karawang	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
12	LTSP Subang	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
Jumlah		19	23	42	2	1	38	1	5	37	1	4	41	1

H. DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3TKI Bandung Tahun 2018 didasarkan pada Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 339);
 9. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
 12. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019;

16. Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor KEP.21/BP3TKI-6/I/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2015 - 2019;
17. Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor KEP.22/BP3TKI-6/I/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BP3TKI Bandung Tahun 2015 - 2019;
18. Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor KEP.11/BP3TKI-6/I/2018 Tentang Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018.

I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3TKI Bandung Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama (*issue* strategis), maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi dan personalia, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

- A. Menjelaskan Rencana Strategis BP3TKI Bandung yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Target Kinerja tahun 2018, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan;
- B. Menjelaskan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan pengelolaan kinerja berupa

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3TKI Bandung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BP3TKI Bandung 2015 – 2019, Program dan Kegiatan dan Perjanjian Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung tahun 2019.

A. RENCANA STRATEGIS BP3TKI BANDUNG 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) BP3TKI Bandung 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah BP3TKI Bandung yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3TKI Bandung beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BP3TKI Bandung telah mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah BP3TKI Bandung maupun stakeholder eksternal. Secara ringkas substansi BP3TKI Bandung dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BP3TKI Bandung yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu :

Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang Berkualitas dan Bermartabat di wilayah Provinsi Jawa Barat

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, BP3TKI Bandung menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- 0 **Zero TKI Informal**, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;
- 1 **Pra Keberangkatan TKI rata-rata 1 Bulan**, Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan;
- 2 **Dua bulan gaji biaya maksimal TKI**, Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan;
- 3 **Remitansi TKI Meningkat 3 kali lipat**, Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat ini sebesar Rp. 70 Triliun/Tahun;
- 4 **Perlindungan utuh di 4 (empat) Tahapan**, TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak di tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan;
- 5 **TKI Purna jalani 5 solusi mandiri**, TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, dan (iii) pendampingan usaha, untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BP3TKI Bandung menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu

Tabel 2
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BP3TKI Bandung

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha
Terwujudnya Tata Kelola Manajemen BP3TKI yang Baik	Persentase laporan rutin yang berbasis web secara tepat waktu
	Nilai AKIP BP3TKI
	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang mudah, murah dan cepat
	Jumlah unit yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM

4. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya BP3TKI Bandung akan menjabarkan dalam sasaran-sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis) yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Program/Kegiatan dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja BP3TKI Bandung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 1 : Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera	
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi p engelolaan keuangan dan wirausaha
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Manajemen BP3TKI yang Baik	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI

5. Target Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019, target jangka menengah sampai dengan tahun 2019 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Target Kinerja BP3TKI Bandung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	167.483
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info	100%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	100%
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	27 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100% TKI
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	40%
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%

6. Arah Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Rencana Strategis sejauh mungkin telah diupayakan dapat mengakomodasikan kebutuhan *stakeholders*, baik internal BP3TKI maupun instansi lain atau masyarakat umum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Arah kebijakan yang akan dilakukan BP3TKI Bandung dalam mendukung terciptanya *clean government dan good governance* sebagaimana matrik berikut ini :

Tabel 5
Arah Kebijakan Dan Strategi BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatkan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dalam rangka pemetaan potensi CTKI	Melakukan kerjasama dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dalam rangka peta potensi CTKI
Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam pendaftaran CTKI dan pengguna/employer dalam proses penempatan	Tersedianya aplikasi jobsinfo online yang menjadi central database lowongan pekerjaan TKI dan terhubung dengan seluruh PPTKIS dan lembaga pendidikan dan pelatihan
Meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen CTKI berbasis SISKOTKLN	Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/Kota dan Pelayanan Prima dalam Penerbitan KTKLN, Verifikasi Dokumen TKI dan memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan sesuai SOP.
Menginformasikan seluruh standar pelayanan menyangkut pra keberangkatan secara online dalam website dan atau media lainnya	Mempublikasikan standar pelayanan pra keberangkatan dalam website dan atau media lainnya
Reformasi bisnis model proses penempatan dan cost structure dalam pelayanan penempatan TKI	Menyederhanakan bisnis model proses penempatan TKI Menekan biaya yang dikeluarkan TKI
Mewujudkan transaksi dalam proses pelayanan TKI sejak pra keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Mewujudkan transaksi non tunai terintegrasi secara online sistem untuk semua laporan
Peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat / lembaga secara luas	Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat / lembaga secara luas
Peningkatan pembinaan dan monitoring lembaga penempatan dan pendukung penempatan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan pembina sanksi dan rating lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secara periodik Sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPTKIS
Fasilitasi pengaduan yang mudah diakses / terjangkau oleh TKI, responsif dan solutif	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya crisis center yang mampu melayani pengaduan secara online Falitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan Kementerian atau lembaga Perwakilan RI

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan advokasi dan mediasi terhadap TKI	1. Fasilitasi advokasi dan mediasi CTKI/TKI dan TKI Purna bermasalah 2. Membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah di luar negeri bekerjasama dengan Kemlu 3. Tersedianya sistem monitoring pelaksanaan layanan perlindungan hukum 4. Tersedianya fasilitas penyediaan lawyer untuk TKI bermasalah hukum
Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan	Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan
Melakukan langkah-langkah preentif atau pencegahan dan peningkatan penempatan TKI Non Prosedural	Melakukan langkah-langkah preentif atau pencegahan dan peningkatan penempatan TKI Non Prosedural
Meningkatnya pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga	Melaksanakan pemberdayaan CTKI/TKI dan keluarganya demi terwujudnya kesejahteraan
Meningkatkan pemberdayaan WNIO/TKIB/TKI Purna yang tidak berdokumen	Tersedianya strategi pemulangan WNIO/TKIB/TKI Purna yang tidak berdokumen hingga pemberdayaan yang berintegritas
Menyediakan layanan pendamping usaha dan akses permodalan	Tersedianya kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal 1. TKI Purna berwirausaha yang berhasil 2. TKI purna yang tidak dapat berwirausaha dapat disalurkan pada lapangan kerja di dalam negeri
TKI Purna menjadi wirausaha	Tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal) untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin
Meningkatkan pemberdayaan TKI Purna menjadi komunitas kampung TKI	TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas TKI/ Kampung TKI
Penguatan penanganan dan pemulangan serta pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	Tersedianya krisis manajemen protokol menyangkut penyelamatan dan pengembalian TKI yang terintegrasi dengan pemberdayaan di dalam negeri
Penguatan penanganan TKI bermasalah	Melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan kepolisian dalam rangka penanganan TKI bermasalah ke daerah asal
Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional dan menjawab personal	Peningkatan kualitas Rencana Program dan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response) 1. Penyusunan LAKIP yang berkualitas 2. Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB
Menyediakan layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/P4TKI yang didukung penuh dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Kesepakatan prinsip dengan Kepala daerah terkait menyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP daerah berbasis SISKOTKLN

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Perluasan agenda reformasi birokrasi menuju capaian RB yang terbaik	Meningkatnya kasitas birokrasi melalui: 1. Penyusunan grand design 2. Penerapan SPIP 3. Akuntabilitas keuangan 4. Penerapan e-government 5. Manajemen arsip 6. Penerapan Sakip berbasis IT 7. Penyusunan lakip yang berkualitas
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui : 1. Penyusunan standar pelayanan 2. Penyusunan SOP Pelayanan 3. Pendirian LTSP 4. Unit pengaduan masyarakat berbasis IT 5. Sistem Pelayanan berbasis IT
Terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	Meningkatnya pemahaman pegawai tentang aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK)

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

BP3TKI Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan BNP2TKI secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut :

a. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program.

Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, bertanggung jawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	167.483
	Persentase CTKI mendaftar pada job info	100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	27 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 1.782.633.000,-		
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		

b. Seksi Penyiapan Penempatan

Seksi Penyiapan Penempatan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 7
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Seksi Penyiapan dan Penempatan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem	100%
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100%
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 2.413.813.000,-		
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		

c. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 8
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI	10%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100% TKI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	40%
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	100%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 475.140.000,-		
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		

d. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 9
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelayanan Administrasi Kerjasama, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat fungsi	Prosentase Layanan terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%
	Jumlah Pembangunan Zona Intgritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegritasnya aplikasi system informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 9.975.377.000,-		
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE:/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujudnya nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BP3TKI Bandung telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra BP3TKI Bandung tahun 2015 – 2019. Penetapan Kinerja tingkat BP3TKI Bandung Tahun 2019 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja Tahunan BP3TKI Bandung Renstra Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP3TKI Bandung tahun 2019 masih mengacu pada Renstra BP3TKI Bandung sebagaimana Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor.KEP.21/BP3TKI-6/I/2016, sebagai berikut:

Tabel 10
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BP3TKI Bandung Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	167.483
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info	100%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	100%
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulauan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulauan menggunakan transaksi secara non tunai	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	27 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100% TKI
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	40%
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 14.646.963.000,-		
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI		

2. Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan BP3TKI Bandung Tahun 2019, telah dibuat Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019 sesuai Peraturan BP3TKI Bandung Nomor : KEP.21/BP3TKI-6/I/2019 tentang Perjanjian Penetapan Kinerja Kepala BP3TKI Bandung Tahun 2019. Adapun Penetapan Kinerja Kepala BP3TKI Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	167.483
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info	100%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	100%
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	27 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100% TKI
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	40%
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 14.646.963.000,-		
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI		

Karena adanya pencermatan, refofusing dan penghematan Tahun 2019, maka terjadi perubahan target pada Penetapan Kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 12
Reviu Target Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	<i>Jumlah Potensi CTKI</i>	<i>8.000</i>
	<i>Persentase CTKI mendaftar pada Job info</i>	<i>30%</i>
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	100%
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	<i>Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN</i>	<i>9 Kab/Kota</i>
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100%
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	<i>Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha</i>	<i>900</i>
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	40%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 14.646.963.000,-		
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI		

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta Analisis capaian kinerja merupakan rangkaian system akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BP3TKI Bandung.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada BP3TKI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

Tabel 13
Kategori Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Penilaian kinerja pada BP3TKI Bandung dilakukan selama 1 tahun. Secara rinci hasil penilaian kinerja BP3TKI Bandung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 14
Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019
(Per Triwulan)

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	
Kementerian/Lembaga	: BNP2TKI
Unit Kerja	: BP3TKI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 14.646.963.000,-, <i>Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 14.441.786.163,- atau 98,60%</i>
Program	: Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	8.000	2.000	984	2.000	819	2.000	383	2.000	512
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	30%	7,5%	5,6%	7,5%	5,6%	7,5%	5,6%	7,5%	6,9%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	25%	45,76%	25%	45,26%	25%	48,75%	25%	36,58%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	100%	25%	12,42%	25%	11,79%	25%	11,56%	25%	9,96%
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	25%	17,13%	25%	16,72%	25%	20,52%	25%	10,76%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/ Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%	100%	94,38%	100%	97,59%	100%	100%	100%	97,32%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	25%	42,75%	25%	38,00%	25%	47,75%	25%	45,25%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	100%	10%	10,69%	10%	9,5%	10%	11,94%	10%	11,31%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	25%	8,19%	25%	3,95%	25%	4,19%	25%	4,97%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	100%	25%	45,76%	25%	45,26%	25%	48,75%	25%	36,58%
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	75	0	225	0	300	0	300	0
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	12	0	12	0	13	0	13	0
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	10%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	0%
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200	300	0	300	0	300	0	300	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	12	10	12	12	13	13	13	19
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	B	B	B	B	B	B	B
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 15
Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	
Kementerian/Lembaga	: BNP2TKI
Unit Kerja	: BP3TKI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 14.646.963.000,-, <i>Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 14.441.786.163,- atau 98,60%</i>
Program	: Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	8.000	6.151	76,89	228.515.000	227.385.747	99,51
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	30%	10%	33,33			
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	133,46%	133,46	2.413.813.000	2.331.549.181	96,59
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	100%	34,77%	34,77			
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	48,54%	48,54			
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100	1.143.264.000	1.141.873.469	99,88
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%	90,18%	90,18	410.854.000	410.024.046	99,80
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	173,75%	173,75	363.810.000	316.389.800	86,97

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%	11,31%	113,1	28.770.000	28.193.086	97,99
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	5,32%	5,32			
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	0%	0	64.960.000	64.054.600	98,61
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	100%	133,46%	133,46			
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	0	0	17.600.000	16.888.498	95,96
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	0			
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	0%	0			
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200	0	0			
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	0	0			
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	48	96	1.164.582.000	1.161.081.036	99,70
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	12 bulan	100	8.810.795.000	8.756.480.180	99,38
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	80			
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	100%	100	8.810.795.000	8.756.480.180	99,38
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi	4 Lokasi	100			
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100			

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam pelaksanaannya Evaluasi Capaian Kinerja pada BP3TKI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja. Secara rinci hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran BP3TKI Bandung Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 16
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	8.000	6.151	76,89
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	30%	10%	33,33
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	133,46%	133,46
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem	100%	34,77%	34,77
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	48,54%	48,54
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/ Kota	9 Kab/Kota	100
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%	90,18%	90,18
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	173,75%	173,75
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%	11,31%	113,1
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	5,32%	5,32

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	0%	0
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	100%	133,46%	133,46
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	0	0
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	0
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	0%	0
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas	1.200	0	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	0	0
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	48	96
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	12 bulan	100
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	80
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	100%	100
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi	4 Lokasi	100
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada BP3TKI Bandung dilakukan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun. Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesatu Tersedianya Peta Potensi CTKI

Tabel 17
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah Potensi CTKI	5.400	5.943	110,06	8.000	6.151	76,89
Persentase CTKI mendaftar pada Job Info	30%	10%	33,33	30%	10%	33,33

- **Jumlah Potensi CTKI**

Jumlah target potensi CTKI dari Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kab/Kota sebanyak sebanyak 8.000 orang. Seharusnya target potensi CTKI tahun 2019 berjumlah 167.843 orang, namun terdapat revisi dengan jumlah target menjadi 8.000 orang. Dari laporan 27 Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang diperoleh dari lembaga pendidikan (SMK Kejuruan, Akademi Kebidanan, Poltekkes), Lembaga Pelatihan dan Balai Latihan Kerja, peminat kerja ke Luar Negeri, pencaker yang datang ke BP3TKI Bandung serta Alumni Sekolah Keperawatan yang berminat bekerja sebagai perawat di Kuwait diperoleh data potensi CTKI Tahun 2019 sebanyak 6.151 orang CTKI atau 76,89%.

- **Persentase CTKI mendaftar pada Job Info**

Jumlah target persentase CTKI mendaftar pada Job Info sebesar 30%, namun realisasinya tidak tercapai dikarenakan CTKI tertarik hanya ke Negara Penempatan tertentu dan hanya tertarik pada job tertentu, sedangkan kedua alasan tersebut belum bisa difasilitasi oleh website BNP2TKI. Sehingga realisasi persentase CTKI mendaftar pada Job Info tahun 2019 sebesar 10%. Proses sign up Jobsinfo tidak bisa langsung terdaftar karena ada proses verifikasi oleh pusat. Pencari kerja merasa kebingungan pada saat mendaftar karena banyaknya data yang perlu diisi. Tidak ada tools untuk BP3TKI agar dapat memantau perkembangan jumlah pendaftar Jobsinfo setiap bulannya sehingga kami tidak dapat melaporkan perkembangan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Jobsinfo secara mandiri.

2. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua

Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI

Tabel 18
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	115,34%	115,34	100%	133,46%	133,46
Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	90%	31,67%	35,19	100%	34,77%	34,77

- **Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan**

Jumlah target penempatan TKI pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu sejumlah 20.000 orang. Pada bulan November terdapat Revisi Anggaran dan jumlah target penempatan TKI menjadi 28.852. Sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 38.507 orang atau sebesar 133,46%. Lebihnya capaian target persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan sebesar 100% dikarenakan masyarakat umum khususnya CTKI sudah mengetahui dan memahami kebijakan dan persyaratan untuk dapat melakukan proses pembuatan E-KTKLN di BP3TKI Bandung sebelum keberangkatan ke negara penempatan.

- **Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem**

Dari jumlah target 100% penempatan TKI yang memenuhi standar, untuk tahun 2019 inipun ditargetkan 100% penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem. Pada bulan November terdapat Revisi Anggaran dan jumlah target penempatan TKI menjadi 28.852. Sampai tahun 2019 jumlah TKI Formal berjumlah 10.031 orang atau sebesar 34,77% dari jumlah 28.852 orang (100% dari jumlah penempatan), sehingga TKI Formal banyak yang merasa tidak perlu membuat E-KTKLN karena sudah tidak ada bukti fisik berupa kartu. Adapun bukti bahwa TKI tersebut sudah membuat E-KTKLN adalah Foto dan Finger Print yang terekam pada sistem E-KTKLN.

3. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketiga Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai

Tabel 19
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	25,20%	25,20	100%	48,54%	48,54

- **Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai**

Kebijakan pemerintah mengenai proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai baru diaplikasikan pada akhir tahun 2015 sehingga target dan pencapaian persentasenya masih kecil. CTKI yang proses pelayanannya sudah menggunakan transaksi secara non-tunai baru bisa di realisasikan melalui PPTKIS di P4TKI Bekasi yang menerapkan transaksi secara non-tunai bekerja sama dengan Bank Pemerintah atau biasa disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, sedangkan CTKI/TKI Mandiri baik di BP3TKI Bandung dan P4TKI lainnya masih diperbolehkan menggunakan transaksi tunai. Dari jumlah target 28.852 orang yang menggunakan transaksi non-tunai baru tercapai sejumlah 14.004 orang atau sebesar 48,54%.

4. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keempat Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural

Tabel 20
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	38 Kab/Kota	40 lokasi	105,26	9 Kab/ Kota	9 Kab/Kota	100

- **Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN**

Terdapat revisi target jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN dari 27 Kab/Kota menjadi 9 Kab/Kota se-Jawa Barat dikarenakan pada tahun 2019 BP3TKI Bandung hanya mempunyai 1 Paket Sosialisasi yaitu Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman dengan narasumber setara Menteri. Sosialisasi sudah dilaksanakan selama periode Januari – April di 9 Kab/Kota diantaranya di Kab. Garut, Kab. Purwakarta, Kab. Bogor, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung dan Kota Bandung dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang di masing-masing lokasi. Selama menjalankan sosialisasi pada tahun 2019, tidak ada hambatan yang berarti karena terdapat hubungan yang baik antara BNP2TKI, BP3TKI, dan Dinas Tenaga Kerja di Daerah. Realisasi waktu pelaksanaan dan lokasi sosialisasi selalu sesuai dengan perencanaan proses penyelesaian administrasi berlangsung lancar.

5. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kelima
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku

Tabel 21
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	95%	55,06%	57,96	100%	90,18%	90,18

- **Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan**

Peningkatan target persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan dikarenakan indikator penilaian kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku menggunakan data kasus/pengaduan dari CTKI/TKI/keluarganya yang terdata di Crisis Center BNP2TKI.

Sepanjang tahun 2019, jumlah P3MI di wilayah kerja Jawa Barat sebanyak 83 P3MI. Pada Triwulan III jumlah P3MI di Jawa Barat bertambah menjadi 113 P3MI. Prosentase target di setiap triwulannya tetap yaitu 100% dari jumlah P3MI, dimana 113 P3MI tersebut mematuhi standar pelayanan atau 100%. Berdasarkan data pengaduan TKI

pada tahun 2019 terdapat 11 P3MI atau sebesar 9,82% yang memiliki kasus TKI yang belum terselesaikan. Sedangkan yang mematuhi standar pelayanan berjumlah 101 P3MI atau sebesar 90,18%.

Kasus PPTKIS seringkali dibiarkan berlarut-larut sehingga penyelesaian kasus yang terjadi di PPTKIS cenderung lama. Saat ini tools yang dimiliki baru tools untuk menilai LPK. Belum adanya tools untuk menilai kepatuhan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk melakukan penilaian kepatuhan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan secara menyeluruh di BP3TKI Bandung. Saat ini kepatuhan dilihat dari keaktifan dalam berkoordinasi dengan BP3TKI Bandung. Belum sebandingnya antara alokasi anggaran pembinaan dengan jumlah Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan di wilayah kerja Jawa Barat menyebabkan Koordinasi lebih banyak dilakukan melalui surat dan telepon.

6. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keenam Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan

Tabel 22
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	276%	276	100%	173,75%	173,75

- **Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI**

BP3TKI Bandung melayani pengaduan secara langsung (tatap muka) maupun yang berupa surat tembusan. Hingga saat ini baik BP3TKI Bandung, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang selalu menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk dan berkoordinasi BNP2TKI (Pusat) maupun dengan Perwakilan RI yang berada di Negara Penempatan. Target jumlah pengaduan tahun 2019 sebesar 400 kasus, sedangkan jumlah realisasi 695 kasus atau sebesar 173,75% Terdiri dari 658 kasus berupa surat masuk dan 37 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka).

7. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh

Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI

Tabel 23
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	15%	13,25%	88,33	10%	11,31%	113,1
Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	71%	71	100%	5,32%	5,32

- **Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI**

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI terjadi dikarenakan BP3TKI Bandung selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan CTKI/TKI dengan memanggil para pihak untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak TKI. Semakin tertatanya proses penempatan dan perlindungan TKI sehingga permasalahan-permasalahan TKI di Luar Negeri menjadi berkurang.

- **Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum**

BP3TKI Bandung melayani setiap pengaduan langsung yang datang ke BP3TKI Bandung. BP3TKI juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk setiap perkara yang membutuhkan bantuan hukum. Di tahun 2019 ini jumlah pengaduan langsung ke BP3TKI Bandung sebesar 37 kasus atau 5,32% dari total pengaduan yang terdaftar di Crisis Center BP3TKI Bandung sebesar 695 kasus.

8. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan

Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan

Tabel 24
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	85%	0%	0	100%	0%	0
Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	97%	118,90%	112,58	100%	133,46%	133,46

- **Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen**

Capaian persentase system monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen masih 0% dikarenakan BP3TKI Bandung belum memiliki unit intelejen untuk mendukung penyelesaian masalah TKI.

- **Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural**

BP3TKI Bandung hanya akan memberangkatkan CTKI ke Negara Penempatan yang sudah mengikuti prosedur yang sesuai dan berdokumen lengkap sesuai ketentuan berlaku seperti sudah mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan diterbitkannya E-KTKLN di BP3TKI Bandung, P4TKI Bekasi, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang. Selain itu, BP3TKI Bandung juga melakukan sosialisasi untuk menjadi TKI yang legal di kantong-kantong TKI Non Prosedural. Dari jumlah target 28.852 TKI (100% dari jumlah penempatan 28.852 TKI) tercapai 38.507 orang TKI atau sebesar 133,46%.

9. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

Tabel 25
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	900	100	900	0	0
Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	0	50	0	0
Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	50%	47%	94	40%	0%	0
Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.140	0	0	1.200	0	0
Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	85%	0%	0	100%	0%	0

- **Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha**

Jumlah target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha tahun 2019 sebanyak 900 orang. Seharusnya target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha berjumlah 3.000 orang. Adapun revisi jumlah target dikarenakan dalam anggaran untuk kegiatan kewirausahaan hanya dilaksanakan kegiatan yang regular masih belum terdapat anggaran tambahan (APBNP) untuk kegiatan kewirausahaan. Realisasi pada tahun 2019 masih 0 dikarenakan pada tahun ini tidak ada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan TKI Purna yang diselenggarakan oleh BP3TKI Bandung. Adapun penyebab ditiadakannya kegiatan tersebut dikarenakan adanya perubahan skema pelatihan kewirausahaan, dimana program akan diatur oleh pusat baik kegiatan maupun anggaran dananya.

- **Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan**

Capaian pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan tahun 2019 masih sebesar 0% dikarenakan tidak terdapat anggaran pelatihan kewirausahaan dalam POK BP3TKI Bandung sehingga kegiatan pemberdayaan tidak dilaksanakan.

- **Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha**

Jumlah persentase TKI Purna yang menjadi wirausaha tahun 2019 sebanyak 0 dari total target 400 orang karena tidak terselenggaranya kegiatan pelatihan kewirausahaan. Upaya dari BP3TKI Bandung dalam mengarahkan TKI Purna agar menjadi Wirausaha salah satunya dengan memonitor para peserta setelah mendapatkan program pemberdayaan (pelatihan). Namun pasca kegiatan edukasi, tidak semua peserta bisa menerapkan ilmu yang diperoleh.

- **Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI**

Pada tahun 2019 jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI masih sebesar 0% karena BP3TKI Bandung tidak meluncurkan Kampung TKI dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran.

- Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya**
 Jumlah persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya masih sebesar 0% karena BP3TKI Bandung belum melakukan fasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya.

10. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah

Tabel 26
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	200	117	58,5	50	48	96

- Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal**

BP3TKI Bandung memiliki Pos Pelayanan Pendataan Kepulangan dan Keberangkatan TKI di Debarkasi Embarkasi Bandara Husein Sastranegara Bandung yang selalu melakukan pendataan TKI yang kepulangannya bermasalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya. Jumlah target fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal tahun 2019 sebanyak 50 orang. Pelayanan Pemulangan TKI Ilegal/Bermasalah bisa dilakukan di Pos Pelayanan BP3TKI Bandung yang berada di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Untuk tahun 2019 tercatat ada 35 orang TKI B yang difasilitasi kepulangannya. Sementara itu, Pelayanan Pemulangan TKI Ilegal/Bermasalah di Bandara Kertajati Majalengka sebanyak 13 orang TKI B. Dengan demikian, total penanganan TKI Ilegal/bermasalah tahun 2019 sebanyak 48 orang atau sebesar 96%.

11. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan

Tabel 27
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	12 bulan	100	12 Bulan	12 bulan	100
Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	80	A	B	80

- **Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel**

Pada tahun 2019 terlaksananya pelaporan berbasis web secara tertib tercapai 100%, dikarenakan terpenuhinya perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang memadai dan terpenuhinya kerangka laporan yang telah baku, sehingga pelaporan bisa terselesaikan secara tepat waktu. Laporan Kegiatan BP3TKI Bandung masih belum bisa dinilai sudah berbasis akuntabel dikarenakan masih terdapat data yang selisih pada Laporan Tahunan. Hasil perhitungan data bulanan secara manual dari setiap seksi dan P4TKI terkadang berbeda dengan data rekapitulasi pada Laporan Tahunan yang diserahkan kepada Sub Bag Tata Usaha.

- **Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP**

Tercapainya peningkatan penilaian kualitas AKIP dengan nilai B diperoleh karena terdapat dukungan kegiatan pengendalian/pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin diselenggarakan oleh BNP2TKI. Adapun acuan dari pelaksanaan AKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah dirancang selama 5 (lima) tahun ke depan.

12. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi

Tabel 28
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas
Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	55,56%	55,56	100%	100%	100

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	10 Lokasi	6 lokasi	60	4 Lokasi	4 Lokasi	100
Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100	100%	100%	100

- **Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/ LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat**

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di wilayah kerja BP3TKI Bandung masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Target pelaksanaan LTSP sebanyak 9 lokasi di Provinsi Jawa Barat diantaranya di Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang. Pada saat ini yang sudah diresmikan dan beroperasi sebanyak 5 lokasi yaitu :

No.	LTSP/LTSA	Tanggal Peresmian
1.	Kab. Indramayu	10 Oktober 2016
2.	Kab. Cirebon	06 Desember 2016
3.	Kab. Sukabumi	27 Desember 2017
4.	Kab. Subang	08 Februari 2018
5.	Kab. Karawang	14 Februari 2018

- **Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)**

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2019 diterapkan di 4 lokasi satuan kerja, diantaranya BP3TKI Bandung, P4TKI Bekasi, P4TKI Cirebon dan P4TKI Sukabumi. Hal ini terjadi oleh karena adanya komitmen bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Anti Korupsi.

- **Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI**

Jumlah persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI sebesar 100%, dikarenakan BP3TKI Bandung sudah menerapkan aplikasi tersebut untuk memudahkan petugas rekapitulasi kehadiran dalam mensinkronkan jumlah kehadiran secara manual dengan rekapitulasi kehadiran secara finger print. Selain itu adanya penguatan jaringan komputer dan koordinasi yang baik dengan Biro Kepegawaian BNP2TKI. Dari keseluruhan jumlah pegawai di BP3TKI Bandung sudah hampir setengah pegawai yang menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP3TKI Bandung ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIPA tahun 2019 sebesar Rp. 13.978.852.000,-, namun terdapat revisi anggaran pada bulan November menjadi Rp. 14.646.963.000,-. Adapun realisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 14.453.919.643,- atau 98,60%. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2018 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.596.989.905,- (92,98%) maka terjadi kenaikan sebesar 5,62%.

Secara keseluruhan kegiatan penyerapan anggaran pada BP3TKI Bandung tahun 2019 relatif tinggi melebihi jumlah target 100% dengan penyerapan sebesar 98,60. Adapun penyerapan yang paling tinggi terdapat pada kegiatan Pelaksanaan Online System/Jobinfo dengan persentase hampir 100% dikarenakan kegiatan tersebut terlaksana di Kabupaten/Kota sesuai rencana kegiatan yang dibuat pada awal tahun anggaran. Sedangkan penyerapan yang paling rendah terdapat pada kegiatan Penanganan TKI Bermasalah dengan persentase 86,97% dikarenakan jumlah penanganan TKI Bermasalah tidak mencapai target sejumlah 50 kasus.

Tabel 29
Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Tahun 2019

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019		
KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BNP2TKI
UNIT KERJA	:	BP3TKI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN	:	2019

KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Peta Potensi TKLN Berbasis Permintaan :				
1. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan TKI	1.143.264.000	1.141.873.469	99,88	1.390.531
2. Pemetaan Potensi CTKI/TKI	118.685.000	117.560.747	99,05	1.124.253
3. Pelaksanaan Online System/Jobinfo	109.830.000	109.825.000	100,00	5.000
4. Pembinaan terhadap Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan	410.854.000	410.024.046	99,80	829.954
CTKI/TKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural :				
1. Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	1.768.205.000	1.710.551.750	96,74	57.653.250
2. Pelatihan Pra Pemberangkatan Penempatan G To G	354.387.000	351.078.898	99,07	3.308.102
Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna :				
1. Penanganan TKI Bermasalah	363.810.000	316.389.800	86,97	47.420.200
2. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	64.960.000	64.054.600	98,61	905.400
3. Pelayanan Mediasi dan Advokasi Perlindungan CTKI/TKI	28.770.000	28.193.086	97,99	576.914
4. Operasional Pos Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi	17.600.000	16.888.498	95,96	711.502
Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap :				
1. Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap	291.221.000	269.918.533	92,69	21.302.467
Layanan Sarana dan Prasarana Internal :				
1. Peralatan dan Mesin	17.500.000	17.382.775	99,33	117.225
Layanan Dukungan Manajemen Satker :				
1. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapam	1.147.082.000	1.143.698.261	99,71	3.383.739
Layanan Perkantoran :				
1. Gaji dan Tunjangan	4.506.895.000	4.498.333.439	99,81	8.561.561
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.303.900.000	4.258.146.741	98,94	45.753.259

Tabel 30
Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2019

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019					
PER BELANJA					
KODE	MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
51	Belanja Pegawai	4.506.895.000	4.498.333.439	99,81	8.561.561
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.515.228.000	2.508.268.056	99,72	6.959.944
5122	Belanja Lembur	80.280.000	80.239.000	99,95	41.000
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.911.387.000	1.909.826.383	99,92	1.560.617
52	Belanja Barang	10.122.568.000	9.938.203.429	98,18	184.364.571
5211	Belanja Barang Operasional	2.932.996.000	2.911.094.365	99,25	21.901.635
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.692.458.000	1.631.748.605	96,41	60.709.395
5218	Belanja Barang Persediaan	239.413.000	236.782.500	98,90	2.630.500
5221	Belanja Jasa	2.545.339.000	2.463.159.004	96,77	82.179.996
5231	Belanja Pemeliharaan	488.756.000	482.858.257	98,79	5.897.743
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.223.606.000	2.212.560.698	99,50	11.045.302
53	Belanja Modal	17.500.000	17.382.775	99,33	117.225
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000	17.382.775	99,33	117.225

Tabel 31
Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2019

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019				
PER JENIS BELANJA				
MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	14.646.963.000	14.441.786.163	98,60	205.176.837
A. Belanja Pegawai	4.506.895.000	4.493.177.820	99,70	13.717.180
B. Belanja Barang/Jasa	10.122.568.000	9.931.225.568	98,11	191.342.432
C. Belanja Modal	17.500.000	17.382.775	99,33	117.225

E. KENDALA

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak TKI/CTKI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat TKI / memberikan info ke Keluarga TKI tentang permasalahan TKI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan PPTKIS untuk mediasi sangat sulit dikarenakan PPTKIS apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak PPTKIS yang tutup.
- 3) Counter Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan TKI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan TKI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor formal untuk tujuan Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya untuk diinformasikan kepada pencari kerja.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website *jobsinfo* (*jobsinfo.bnp2tki.go.id*) dan cara menggunakannya.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum terdapat mesin Finger Print untuk Petugas Honorer sehingga absensi masih secara manual.
- 2) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

F. TINDAK LANJUT

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan TKI Korea untuk mendapatkan data TKI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan BNP2TKI (Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Promosi) mengenai lowongan kerja yang tersedia di wilayah Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya;
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website jobsinfo.bnp2tki.go.id kepada pencari kerja.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Konsultasi dan koordinasi dengan BNP2TKI untuk mengatasi permasalahan absensi untuk Petugas Honorar.
- 2) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi semua pihak terutama masyarakat Propinsi Jawa Barat dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Program Kerja, Penetapan Kinerja antara Kepala BNP2TKI dengan Kepala BP3TKI maupun Rencana Strategis (Renstra) BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (BP3TKI) Bandung Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pelayanan Teknis di BP3TKI Bandung secara umum sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan dibandingkan tahun 2018 yang realisasinya melebihi target atau sebesar 133,46% dikarenakan masyarakat umum khususnya CTKI sudah mengetahui dan memahami kebijakan dan persyaratan untuk dapat melakukan proses pembuatan KTKLN di BP3TKI Bandung sebelum keberangkatan ke negara penempatan.
 - b. Jumlah Pemberdayaan TKI yang semula melibatkan 3.000 peserta berkurang menjadi 900 peserta masih belum bisa terealisasi dikarenakan kegiatan

pemberdayaan TKI pada tahun 2019 ini tidak bisa dilaksanakan dan tidak terdapat anggaran dalam POK tahun 2019. Anggaran peningkatan pemberdayaan dipergunakan untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi TKI Purna dan keluarganya.

- c. Menurunnya jumlah target dan capaian peta potensi TKI di Jawa Barat karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang menarik minat CTKI.
- d. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dengan terintegrasinya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK).

B. SARAN

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (BP3TKI) Bandung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pusat dan daerah.

Bandung, 20 Januari 2020

Plt. Kepala,

Ttd.

Tugiyarto, S.Sos.

NIP. 19671209 198602 1 001



LAMPIRAN

**TABEL
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	8.000	2.000	984	2.000	819	2.000	383	2.000	512
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	30%	7,5%	5,6%	7,5%	5,6%	7,5%	5,6%	7,5%	6,9%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	25%	45,76%	25%	45,26%	25%	48,75%	25%	36,58%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	100%	25%	12,42%	25%	11,79%	25%	11,56%	25%	9,96%
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	25%	17,13%	25%	16,72%	25%	20,52%	25%	10,76%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/ Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%	100%	94,38%	100%	97,59%	100%	100%	100%	97,32%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	25%	42,75%	25%	38,00%	25%	47,75%	25%	45,25%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%	10%	10,69%	10%	9,5%	10%	11,94%	10%	11,31%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	25%	8,19%	25%	3,95%	25%	4,19%	25%	4,97%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	100%	25%	45,76%	25%	45,26%	25%	48,75%	25%	36,58%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	75	0	225	0	300	0	300	0
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	12	0	12	0	13	0	13	0
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	10%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	0%
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200	300	0	300	0	300	0	300	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	12	10	12	12	13	13	13	19
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	B	B	B	B	B	B	B
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 BERDASARKAN REALISASI TRIWULAN

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2019				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	8.000	984	819	383	512	76,89
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	30%	5,6%	5,6%	5,6%	6,9%	33,33
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	45,76%	45,26%	48,75%	36,58%	133,46
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	100%	12,42%	11,79%	11,56%	9,96%	34,77
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	100%	17,13%	16,72%	20,52%	10,76%	48,54
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	9 Kab/ Kota	7 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	100
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	100%	94,38%	97,59%	100%	97,32%	90,18
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	42,75%	38,00%	47,75%	45,25%	173,75
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	10%	10,69%	9,5%	11,94%	11,31%	113,1
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	8,19%	3,95%	4,19%	4,97%	5,32
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	100%	0%	0%	0%	0%	0
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	100%	45,76%	45,26%	48,75%	36,58%	133,46

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2019				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	900	0	0	0	0	0
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	0	0	0	0
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	40%	0%	0%	0%	0%	0
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.200	0	0	0	0	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	100%	0%	0%	0%	0%	0
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	50	10	12	13	19	96
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A	B	B	B	B	80
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	100%	100%	100%	100%	100
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	100
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	100%	100%	100%	100